

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM BIDANG PERTANIAN  
OLEH LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DI DESA JADIMULYA KECAMATAN LANGKAPLANCAR  
KABUPATEN PANGANDARAN**

**NETI SUNARTI**

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan  
FISIP Universitas Galuh Ciamis

**ABSTRAK**

*Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terdapatnya permasalahan yang dihadapi petani yang diduga disebabkan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat belum optimal dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian, seperti kurangnya pelibatan petani dalam kegiatan sekolah lapangan pertanian sebagai wadah pengembangan keterampilan petani dalam mengelola usatannya. Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah adalah : 1) Bagaimana pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat?; 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian?; 3) Bagaimana upaya-upaya yang ditempuh oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat untuk mengatasi hambatan-hambatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian ?*

*Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini akan dilakukan selama 8 (delapan) bulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut : 1) Pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari pendapat informan bahwa sudah baik sebesar 40 % dan yang menyatakan kurang baik sebesar 60 %. Berdasarkan hasil observasi bahwa pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat kurang baik sesuai dengan tahap-tahap yang harus dilalui dalam melakukan pemberdayaan masyarakat menurut Sumodiningrat (2007:145). 2) Adanya hambatan-hambatan seperti masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti berbagai pertemuan yang dilaksanakan. Begitupula hasil observasi bahwa hambatan-hambatan antara lain masih kurangnya peran serta masyarakat petani dalam mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga pemberdayaan masyarakat. 3) Adanya upaya-upaya seperti dilakukannya pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan penyuluhan dengan mengundang masyarakat untuk mengikuti kegiatan penyuluhan, melakukan kegiatan pelatihan bagi masyarakat dalam pengelolaan pertanian, melakukan pembentukan kelompok-kelompok tan sehingga dapat mempermudah komunikasi antar kelompok. Begitupula hasil observasi adanya upaya-upaya antara lain melakukan peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola hasil pertaniannya.*

**Kata Kunci :** *Pemberdayaan masyarakat, Pertanian, LPM*

## PENDAHULUAN

Untuk mewujudkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Pada tatanan pemerintahan diperlukan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggung jawab, dan demokrasi, sedangkan pada tatanan masyarakat perlu dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama.

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi desa, pengembangan lembaga keuangan desa, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya.

Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat seharusnya mampu berperan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih berkualitas. Pembentukan dan perubahan perilaku tersebut, baik dalam dimensi sektoral yakni dalam seluruh aspek atau sektor-sektor kehidupan manusia; dimensi kemasyarakatan yang meliputi jangkauan kesejahteraan dari materiil hingga non materiil; dimensi waktu dan kualitas yakni jangka pendek hingga jangka panjang dan peningkatan kemampuan dan kualitas untuk pelayanannya, serta dimensi sasaran

yakni dapat menjangkau dari seluruh strata masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tidak lain adalah memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat agar mampu menggali potensi dirinya dan berani bertindak memperbaiki kualitas hidupnya, melalui cara antara lain dengan pendidikan untuk penyadaran dan pemampuan diri mereka.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa dinamika masyarakat pada tingkat desa dapat terwadahi dalam tiga institusi utama, yaitu Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dibentuk untuk mengelola, merencanakan dan melaksanakan pembangunan dengan menggali swadaya gotong-royong masyarakat.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai wadah dalam menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan desa. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dibentuk di setiap desa dengan Peraturan Desa, sedangkan susunan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dipilih dan ditetapkan oleh masyarakat desa yang disahkan atau dikukuhkan dengan Keputusan Kepala Desa yang bersangkutan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan

antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi desa, pengembangan Lembaga Keuangan Desa, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya.

Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran mempunyai wilayah seluas 550.525 hektar yang terdiri dari lahan sawah seluas 114,86 hektar dan lahan darat seluas 435,665 hektar. penggunaan lahan didominasi oleh lahan daratan yang terdiri dari pemukiman seluas 25,000 hektar, kolam seluas 11.434 hektar, sarana umum seluas 44.890 hektar, tegalan kebun ladang huma petani seluas 334.174 hektar. dan penggunaan lahan lainnya seluas 20,270 hektar Sedangkan penggunaan lahan sawah yang terdiri dari lahan sawah irigasi perdesaan seluas 114,757 hektar, dan penggunaan lahan sawah tadah hujan seluas 11,757 hektar.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang pemberdayaan masyarakat petani yang dilakukan oleh lembaga pemberdayaan masyarakat ada di Desa Jadimulya karena berdasarkan kenyataan yang ada hampir sebagian masyarakat Desa Jadimulya merupakan petani atau buruh tani sehingga mereka tidak mempunyai keahlian atau keterampilan yang memungkinkan untuk bekerja pada tingkatan yang lebih tinggi. Keadaan tersebut berdampak pada banyaknya masyarakat di desa Jadimulya yang hanya mengandalkan kekuatan fisiknya dalam bekerja.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan yang penulis lakukan

diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi petani di Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran. Hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut : 1) Kurangnya kebijakan terkait program pemberdayaan petani. Contohnya : Pembentukan kelompok tani hanya dijadikan sebagai formalitas untuk memperoleh bantuan permodalan dari pemerintah sementara penguatan kelembagaan petani tidak pernah dilakukan. 2) Kurangnya pelibatan petani dalam kegiatan sekolah lapangan pertanian sebagai wadah pengembangan keterampilan petani dalam mengelola usahanya. Contohnya : selama ini yang dilibatkan dalam sekolah lapangan pertanian hanya ketua kelompoknya saja sehingga anggota kelompoknya tidak dilibatkan. Hal inilah yang menyebabkan petani di desa kurang memiliki kemampuan dalam mengelola usahanya. 3) Masih kurangnya akses yang diberikan kepada petani untuk memperoleh bantuan permodalan dari lembaga keuangan (perbankan) dalam meningkatkan usahanya. Contohnya : selama ini petani lebih memilih menggadaikan hasil pertaniannya untuk memperoleh pinjaman sehingga dengan cara ini petani tidak memperoleh keuntungan yang maksimal dari hasil usahanya.

Permasalahan tersebut diduga disebabkan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat belum optimal dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian hal ini dibuktikan dengan beberapa indikator sebagai berikut : 1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat kurang melakukan penyadaran dan pembentukan perilaku

sadar sehingga masyarakat kurang menyadari potensi yang ada hal ini dikarenakan pemerintah desa jarang melakukan bimbingan yang dilakukan kepada masyarakat dalam bidang pertanian. 2) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat kurang melakukan transformasi terhadap perkembangan pertanian sehingga masyarakat belum memahami dalam mengambil peran dalam meningkatkan hasil pertanian. 3) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat kurang meningkatkan kemampuan inovatif masyarakat serta kemandirian masyarakat dalam mengembangkan bidang pertanian. Hal ini dikarenakan kurangnya penyuluhan kepada masyarakat dalam membantu memasarkan hasil produksinya.

Permasalahan yang terjadi sangatlah luas dan kompleks, karena itu supaya lebih spesifik penelitian ini difokuskan pada hal berikut ini: 1) Bagaimana pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat? 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian ? 3) Bagaimana upaya-upaya yang ditempuh oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat untuk mengatasi hambatan-hambatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian ?

## LANDASAN TEORITIS

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai wadah dalam menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan desa. Hal ini

berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan pada Pasal 1 angka 13 dinyatakan bahwa :

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, untuk selanjutnya disingkat LKMD atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, untuk selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Dengan demikian lembaga pemberdayaan masyarakat desa memiliki fungsi dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat.

Adapun pengertian pemberdayaan menurut Zubaedi (2007:62) adalah : "Menyediakan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan dalam rangka meningkatkan kemampuan warga miskin untuk menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakatnya".

Sumodingrat (2007:128) memberikan pengertian pemberdayaan masyarakat menyangkut dua kelompok

yang saling terkait, yaitu : "Masyarakat yang belum berkembang sebagai pihak yang harus diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan".

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mengembangkan kondisi dan situasi sedemikian rupa sehingga masyarakat memiliki daya dan kesempatan untuk mengembangkan kehidupannya.

Menurut Sumodiningrat (2007:145) terdapat tahap-tahap yang harus dilalui dalam melakukan pemberdayaan masyarakat adalah meliputi:

1. Tahap kesadaran dan pembentukan perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
2. Tahap transformasi kemampuan kerja terbuka wawasan pengetahuan, kecakapan, keterampilan, agar membuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan, keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inonatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

## **METODE PENELITIAN**

Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan kurang lebih 8 bulan. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 10 orang yang terdiri dari ketua dan sekretaris Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebanyak 2 orang dan perwakilan masyarakat petani di Desa Jadimulya

Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah *Data Reduction* (Reduksi Data), *Data Display* (Penyajian Data) dan Verifikasi Data.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran.**

Untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Pemberdayaan masyarakat hendaknya mengarah pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seorang atau masyarakat dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan sikap perilaku masyarakat yang terbentuk yang diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan. Kondisi afektif adalah merupakan sense yang dimiliki oleh masyarakat yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat

dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan. Terjadinya keberdayaan pada empat aspek tersebut (kognitif, konatif, afektif dan psikomotorik) akan dapat memberikan kontribusi pada tercapainya kemandirian masyarakat yang dicita-citakan.

Dalam era sekarang ini banyak sekali masalah-masalah sosial yang timbul. Dari banyaknya masalah, paling sering kita dengar ialah masalah sosial ekonomi. Masyarakat dalam kalangan menengah ke bawah-lah yang sering menemui masalah ini. Dikatakan seperti karena masyarakat dalam kalangan menengah ke bawah belum cukup berdaya.

Untuk menjawab permasalahan di atas, dicetuskannya program pemberdayaan masyarakat. Masyarakat yang perlu diberdayakan sangatlah beragam profesinya mulai dari pemuda sampai pada mereka yang sudah usia lanjut. Dalam hal ini, pemberdayaan yang diprogramkan ialah program pemberdayaan bagi mereka masyarakat petani. Masyarakat petani di kawasan pinggiran atau desa masih belum berdaya. Tidak sedikit dari mereka yang masih belum sejahtera.

#### **1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa selama ini pemberdayaan petani melalui tahap penyadaran dan pembentukan perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan kapasitas diri belum benar-benar dimiliki masyarakat khususnya petani sehingga belum ada perubahan yang signifikan dari

masyarakat petani dalam meningkatkan kesejahteraannya hal ini diduga disebabkan karena belum optimalnya petugas atau lembaga dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan pertanian serta masih kurangnya memberikan motivasi untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dalam bidang pertanian sehingga belum dapat menumbuhkan kemauan masyarakat untuk berkembang sehingga mampu menggali potensinya dalam mengembangkan pertanian.

Begitupula dengan hasil observasi bahwa dalam melakukan penyadaran kepada masyarakat petugas masih kurang menjalin komunikasi dengan masyarakat sehingga berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak sampai secara cepat begitupula dengan permasalahan yang dihadapi baik mengenai kurangnya modal usaha, strategi pengelolaan usaha tani belum dapat diberikan secara mudah kepada petani sehingga hal ini menyebabkan adanya masyarakat yang malah beralih kepada bidang lain di luar pertanian yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Hal tersebut berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Nugroho (2001:45) yang menyatakan sebagai berikut :

Pemberdayaan merupakan konsep yang lahir sebagai strategi dalam menjalankan pembangunan yang berakarakan kerakyatan yaitu upaya terarah menampakkan keperpihakan dan ditujukan kepada masyarakat yang memerlukan. Pemberdayaan diaktualisasikan dengan partisipasi melalui pendampingan untuk mentransfer ilmu pengetahuan

(*transfer of knowledge*) dalam kelompok yang terorganisir dengan cara belajar bersama terhadap diri dan lingkungan

Dengan demikian proses penyadaran yang dilakukan oleh petugas belum sepenuhnya dapat menampakan keberpihakan kepada masyarakat yang memerlukan sehingga transfer ilmu pengetahuan belum dapat terorganisir dengan cara belajar secara bersama-sama guna mendapatkan hasil yang lebih baik.

**2. Tahap transformasi kemampuan kerja terbuka wawasan pengetahuan, kecakapan, keterampilan, agar membuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui petugas belum optimal dalam meningkatkan wawasan pengetahuan masyarakat petani secara terbuka sehingga dapat memberikan penyuluhan secara rutin, belum optimalnya pelatihan sehingga belum dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam bidang pertanian serta kurangnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam melakukan pelatihan sehingga dapat meningkatkan kecakapan masyarakat dalam bidang pertanian.

Sementara itu berdasarkan hasil observasi penulis diketahui bahwa masyarakat kurang mendapatkan peningkatan kecakapan maupun pemahaman yang lebih baik oleh petugas karena selama ini memang kegiatan-kegiatan penyuluhan masih kurang terprogram serta kegiatan

pelatihan hanya dilakukan ketika ada program dari pusat dan petugas kurang memiliki inovasi dalam mengembangkan wawasan masyarakat.

Menurut Sulistaini (2004:115) menyatakan bahwa :

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk membuat masyarakat menjadi mandiri, dalam arti memiliki potensi untuk mampu memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi, dan sanggup memenuhi kebutuhannya dengan tidak menggantungkan hidup mereka pada bantuan pihak luar, baik pemerintah maupun organisasi-organisasi non-pemerintah

Dengan demikian maka upaya petugas selama ini belum dapat memberdayakan masyarakat dengan optimal mengingat masyarakat petani belum dapat mandiri dan memiliki potensi untuk mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi dan belum dapat memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

**3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan, keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tahapan peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan dan keterampilan petani belum terlaksana dengan baik mengingat masih kurangnya pelibatan masyarakat dalam melakukan penguatan kelembagaan masyarakat seperti pembentukan kelompok tani, dan kurangnya memberikan akses permodalan dalam mengembangkan usaha pertanian

kepada masyarakat melalui kredit usaha tani serta kurangnya membantu masyarakat dalam memasarkan produk hasil pertanian.

Begitupula dengan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis diketahui bahwa masyarakat petani masih kurang memiliki keterampilan dan kecakapan dalam mengelola hasil usaha pertaniannya sehingga hasil pertanian yang dikelolanya belum dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Husodo (2001:87) menjelaskan bahwa :

Kegiatan prioritas dalam pembangunan ketahanan pangan adalah pemberdayaan masyarakat agar mereka mampu menolong dirinya sendiri dalam mewujudkan ketahanan pangan. Pemberdayaan masyarakat tersebut diupayakan melalui peningkatan kapasitas SDM, membangun kelembagaan masyarakat, dan menyediakan fasilitas produksi (teknologi dan modal usaha) agar dapat secara bersaing memasuki pasar tenaga kerja dan kesempatan berusaha yang dapat menciptakan dan meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Namun demikian maka dalam pelaksanaannya kegiatan yang dilakukan oleh petugas selama ini belum mampu memberdayakan masyarakat melalui peningkatan sumber daya manusia, membangun kelembagaan yang kuat serta kurangnya memberikan fasilitas teknologi pertanian kepada para petani dalam membantu meningkatkan hasil produksinya.

## **2. Hambatan-hambatan yang dihadapi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian di Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran**

Berdasarkan hasil penelitian terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dalam Bidang Pertanian di Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran, yang antara lain sebagai berikut :

1. Hambatan sumberdaya manusia  
Dalam hal ini, para petani kurang mampu meningkatkan dan mengembangkan keahlian dan keterampilannya dalam berusaha tani, sehingga mereka tidak dapat bersaing dengan pihak lain.
2. Hambatan kelembagaan kelompok  
Kelembagaan kelompok tani belum mampu mengembangkan dan meningkatkan kualitas serta efektivitas kelembagaan dan kelompok tani dalam menjalankan peranannya untuk mendukung usaha para petani sehingga keberaanya kurang memberikan manfaat kepada masyarakat.
3. Masalah modal masyarakat  
Kendala yang sering dihadapi oleh para petani adalah kurangnya modal yang mereka miliki dan sulitnya dalam memperoleh modal untuk usaha mereka. seperti kurangnya memberikan kemudahan akses kepada dunia perbankan untuk membantu para petani dalam memperoleh modal.



4. Hambatan Pengembangan usaha produktif  
Kurangnya memberdayakan petani sehingga kurang mampu mengembangkan usaha taninya menjadi lebih produktif dan efisien. sehingga belum dapat meningkatkan pendapatan para petani.
5. Hambatan memperoleh informasi  
Informasi yang diperoleh sangat kurang sehingga petani belum dapat mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi petani dalam mengembangkan usaha para petani.

**3. Upaya-upaya yang ditempuh oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat untuk mengatasi hambatan-hambatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian di Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui adanya beberapa upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat untuk mengatasi hambatan-hambatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian di Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran yang antara lain :

1. Pengembangan sumberdaya manusia  
Dalam hal ini, para petani didorong untuk meningkatkan dan mengembangkan keahlian dan keterampilannya dalam berusaha tani, sehingga mereka tidak kalah bersaing
2. Pengembangan kelembagaan kelompok

Diperlukannya suatu program untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas serta efektivitas kelembagaan dan kelompok tani dalam menjalankan peranannya untuk mendukung usaha para petani.

3. Pemupukan modal masyarakat  
Kendala yang sering dihadapi oleh para petani adalah kurangnya modal yang mereka miliki dan sulitnya dalam memperoleh modal untuk usaha mereka. Sehingga perlu adanya program yang dapat membantu petani dalam memperoleh dan mengelola modal tersebut untuk usahanya.
4. Pengembangan usaha produktif  
Dalam hal ini, adalah bagaimana memberdayakan petani agar mereka mampu mengembangkan usaha taninya menjadi lebih produktif dan efisien. Sehingga dapat meningkatkan pendapatan mereka.
5. Penyediaan informasi tepat-guna  
Teknologi dan informasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam mengembangkan usaha para petani. Oleh karena itu, perlu adanya ketersediaan teknologi dan informasi secara tepat-guna yang dapat mereka manfaatkan secara optimal.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari pendapat informan yang menyatakan bahwa sudah baik sebesar 40 % dan yang menyatakan kurang baik sebesar 60 %. Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran kurang baik sesuai dengan tahap-tahap yang harus dilalui dalam melakukan pemberdayaan masyarakat menurut Sumodiningrat (2007:145).
2. Adanya hambatan-hambatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian di Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran seperti masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti berbagai pertemuan yang dilaksanakan sehingga menyebabkan petani masih kurang memiliki pemahaman mengenai teknologi pertanian terpadu. Begitupula dengan hasil observasi penulis diketahui bahwa adanya hambatan-hambatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian antara lain masih kurangnya peran serta masyarakat petani dalam mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga pemberdayaan masyarakat sehingga mengakibatkan masih kurangnya kemampuan dan keterampilan petani dalam mengolah hasil pertaniannya.
3. Adanya upaya-upaya lembaga Pemberdayaan Masyarakat untuk mengatasi hambatan-hambatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian di Desa Jadimulya Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran seperti dilakukannya pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan penyuluhan dengan mengundang masyarakat untuk mengikuti kegiatan penyuluhan, melakukan kegiatan pelatihan bagi masyarakat dalam pengelolaan pertanian sehingga dapat mengoptimalkan hasil pertanian, melakukan pembentukan kelompok-kelompok tan sehingga dapat mempermudah komunikasi antar kelompok. Begitupula dengan hasil observasi penulis diketahui bahwa adanya upaya-upaya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat untuk mengatasi hambatan-hambatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian antara lain melakukan peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola hasil pertaniannya.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyampaikan berbagai saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam melakukan Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian lebih meningkatkan pemberian motivasi kepada masyarakat tani dalam

- memperkuat kelembagaan kelompok tani, sehingga petani memiliki kemudahan dalam mengakses permodalan dan informasi.
2. Sebaiknya dilakukan upaya untuk mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi melalui kerjasama dengan koperasi maupun perbankan sehingga lembaga tersebut dapat memberikan kemudahan kepada para petani untuk memperoleh permodalan dalam mengembangkan usaha taninya.
  3. Sebaiknya lebih meningkatkan upaya-upaya yang selama ini dilakukan melalui memperkuat potensi dan daya yang dimiliki oleh masyarakat petani sehingga mereka dapat meningkatkan kemampuannya dalam mengoptimalkan hasil pertaniannya.
- Ibrahim, Amin, 2008, *Teori dan Konsep Pelayanan Publik serta Implementasinya*, Bandung: Mandar Maju
- Mardikanto, Totok dan Soebianto, Poerwoko. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Nugroho, Riant. 2007. *Public Policy: Teori Kebijakan – Analisis Kebijakan – Proses*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Rahardjo. 1999. *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Gadjah Mada University Press.
- Roesmidi, 2006. *Pemberdayaan Masyarakat*. Sumedang : Alqaprint Jatinangor.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku :

- Ambar Teguh Sulistyani, 2004, *"Kemitraan dan Model – Model Pemberdayaan"*, Gaya. Gava Media, Yogyakarta.
- Hikmat, Harry. 2006. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Humaniora
- Husodo, dkk. 2009. *Pertanian Mandiri. Pandangan Strategis Para Pakar Untuk Kemajuan Pertanian Indonesia*. Jakarta: Penebur Swadaya
- Soetrisno, Loekman, 1995, *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Penerbit : Kanisius, Yogyakarta.
- Suharto. 2004. *Kebijakan Publik, Teori dan Praktek*. Penerbit Andi. Jakarta
- Zubaedi. 2007. *Pendidikan Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sumber Perundang-undangan :**  
 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
 Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 Pasal 1 angka 13 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.